

TESIS

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP
PEJABAT NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INKAR
DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA**



Diajukan Oleh:

ADITYA LARAS SAKTI SUDARSONO

NIM 2420216310022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN
2026**

TESIS
PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP
PEJABAT NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INKAR
DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA

Usulan Penelitian untuk Tesis S-2 Program Magister Kenotariatan

Diajukan oleh :
ADITYA LARAS SAKTI SUDARSONO
NIM 2420216310022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN BANJARMASIN
2026

Tesis ini
Telah diperbaiki dan disetujui
Pada Tanggal 25 Juni 2026

PEMBIMBING



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

**Diketahui oleh Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



Dr. Hj. Rahmida Erlyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002

**Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis ini telah dipertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji Pada
Tanggal 25 Juni 2026

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aditya Laras Sakti Sudarsono

NIM : 2420216310022

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 25 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



ADITYA LARAS SAKTI SUDARSONO
NIM 2420216310022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

ADITYA LARAS SAKTI SUDARSONO

NIM. 2420216310022

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP
PEJABAT NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INKAR
DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 10%
sesuai dengan kriteria teloransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 28 Juli 2026



Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum

Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEJABAT NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INGKAR DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA

Oleh :

Aditya Laras Sakti Sudarsono, Achmad Faishal

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman

Dalam praktiknya, Notaris sering dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya. Kondisi tersebut menimbulkan dilema karena di satu sisi Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, namun di sisi lain terdapat kepentingan penegakan hukum yang memerlukan keterangan dari Notaris. Untuk mengatasi persoalan tersebut, hukum memberikan hak ingkar kepada Notaris, yaitu hak untuk menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakan berdasarkan jabatan dan profesinya. Hak ingkar pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan para pihak kepada Notaris. Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Keberadaan Notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana faktor-faktor yang menjadi peran Majelis Kehormatan Notaris dalam menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar oleh Notaris dalam proses pemeriksaan hukum Hasil Penelitian ini diharapkan menambah khasanan pengetahuan dan keilmuan dalam kajian ilmu hukum khususnya dalam jabatan notaris dalam pemahaman dari hak ingkar agar penggunaan hak ingkar dapat dipahami oleh pejabat notaris. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan, khususnya terkait Hak ingkar pada Jabatan Notaris, serta menjadi bahan referensi untuk kajian akademik lebih lanjut. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum terkait penerapan Hak ingkat Notaris

serta menjadi rujukan bagi pihak yang mengalami permasalahan serupa. Secara yuridis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam harmonisasi atau pembaruan peraturan perundang-undangan terkait eksistensi dari adanya hak ingkar pada notaris.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang memfokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan diberikan dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu yang mana adanya eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar oleh notaris dalam proses pemeriksaan hukum, yang sebenarnya dalam sumpah jabatan notaris harus merahasiakan isi akta, sehingga notaris seharusnya menjadi pejabat yang dipercaya oleh masyarakat, Penelitian ini merekomendasikan untuk menerbitkan standar tersendiri yang jelas dan seragam dalam melakukan pemberian persetujuan maupun penolakan, dan juga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris secara lebih rinci mengenai eksistensi batasan, prosedur dan mekanisme penggunaan hak ingkar. Kesimpulannya, menerima atau menolak permohonan pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berkaitan erat dengan fungsi perlindungan jabatan Notaris serta kepentingan penegakan hukum. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan aparat penegak hukum dengan menilai relevansi keterangan Notaris terhadap perkara, sehingga penggunaan hak ingkar tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan penegakan hukum. Dalam keadaan tertentu yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang serta telah melalui mekanisme yang ditentukan, termasuk adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, Notaris dapat diminta memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses peradilan.

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEJABAT NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INGKAR DALAM MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA

Oleh :

Aditya Laras Sakti Sudarsono¹, Achmad Faishal²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Hak Ingkar, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Kerahasiaan Akta, Perlindungan Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam menerima atau menolak permohonan pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, serta menganalisis eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar oleh Notaris dalam proses pemeriksaan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris melalui kewenangannya untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanggilan Notaris dan pengambilan dokumen protokol Notaris oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, Majelis Kehormatan Notaris mempertimbangkan urgensi pemeriksaan, keterkaitan akta dengan perkara yang diperiksa, serta kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan. Selain itu, hak ingkar Notaris tetap eksis dan diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai konsekuensi dari kewajiban merahasiakan isi akta dan rahasia jabatan. Namun demikian, penggunaan hak ingkar tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan penegakan hukum yang dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hak ingkar harus diterapkan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan kerahasiaan jabatan Notaris dan kepentingan proses peradilan.

¹ NIM : 2420216310022

² Pembimbing

**ROLE OF NOTARY HONORARY COUNCIL ON NOTARIAL OFFICIAL
USING RIGHT OF REFUSAL IN KEEPING THE CONFIDENTIALITY
OF THE DEEDS**

By:

Aditya Laras Sakti Sudarsono¹, Achmad Faishal²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 100 pages

ABSTRACT

Keywords: Right of Refusal, Notary, Notary Honorary Council, Deed Confidentiality, Legal Protection

This study is aimed at analyzing the factors which become the consideration of the Notary Honorary Council in accepting or rejecting the petition for investigating a Notary by the investigator, public prosecutor, or judge, and analyzing the existence and limit of the use of right of refusal by a Notary in the legal investigation process. This is normative legal research utilizing statute approach and conceptual approach. The legal resources consist of primary, secondary, and tertiary ones with descriptive qualitative analysis. The findings of the research indicate that Notary Honorary Council has significant role in providing legal protection to the Notary through its authority to provide approval or rejection upon petition for summoning a Notary and the taking of documents of Notary's protocols by law enforcement apparatus. By performing its authority, the Notary Honorary Council will consider the urgency of the investigation, the relation between the deeds and the case being investigated, and the need for evidencing in court process. Besides, right of refusal remain existing and it is recognized in Indonesia legal system as the consequence of the obligation to keep the confidentiality of the contents of the deeds and official secrecy. However, the utilization of right of refusal is not absolute because it is restricted by the provisions of the legislation and for the sake of law enforcement conducted through specified mechanism. Therefor, right of refusal must be applied proportionally by keeping to maintain the balance between protection of the Notary's official confidentiality and the interest of judiciary process.

Certified by,



¹ Student Number : 2420216310022

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Beserta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing, atas segala kebijakan akademik dan dukungan terhadap pelaksanaan Program Magister Kenotariatan yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., sebagai Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas arahan dan dukungan selama proses studi
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan hukum, dan pengalaman akademis yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
4. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala bantuan administratif dan kemudahan yang diberikan selama proses studi.
5. Orang tua penulis yang tercinta, atas doa yang tidak pernah putus, cinta kasih yang tulus, serta pengorbanan dan dukungan moral maupun materiil yang menjadi landasan kekuatan terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini.

6. Teman-teman penulis Terbaik, yaitu Taufik Rachman, Sa'adiyah Nur Hizrah, Tri Puspawangi, serta rekan-satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, dan menjadi sumbangsih kecil yang berarti bagi masyarakat.

Banjarmasin, 25 Juni 2026



ADITYA LARAS SAKTI SUDARSONO
NIM 2420216310022

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN (COVER)

Daftar isi..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Keaslian Penelitian 13

D. Tujuan Penelitian..... 15

E. Manfaat Penelitian..... 16

F. Tinjauan Pustaka 17

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris 17

2. Konsep Hak Ingkar 20

3. Teori Kewenangan..... 21

4. Teori Perlindungan Hukum 23

G. Metode Penelitian..... 26

H. Bahan Hukum..... 28

I. Pengumpulan Data 28

J. Analisis Data 29

K. Sistematika Penulisan..... 29

BAB II PEMBAHASAN HAK INGKAR NOTARIS DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN..... 31

A. WEWENANG NOTARIS	31
B. HAK INGKAR NOTARIS	38
C. SANKSI TERHADAP HAK INGKAR.....	42
D. PENGGUNAAN HAK INGKAR.....	46
1. Penggunaan Hak Ingkar Ketika Memberikan Keterangan/ Saksi di Hadapan Majelis Kehormatan Notaris	46
2. Penggunaan Hak Ingkar Ketika Notaris Diperiksa sebagai Saksi/ Memberikan Keterangan dalam Proses Penyidikan.....	48
3. Penggunaan Hak Ingkar Ketika Notaris Diperiksa sebagai saksi di pengadilan	49
E. HAK INGKAR NOTARIS DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM UNTUK MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI SAKSI DI PENGADILAN	51
BAB III BENTUK PERAN PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP NOTARIS DALAM MEMAKAI HAK INGKAR NYA UNTUK MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA DI PENGADILAN.....	55
A. MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS	55
B. IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA	63
C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS MENURUT MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS	65
BAB IV PENUTUP	98
A. KESIMPULAN	98

B. SARAN	99
----------------	----

Daftar Pustaka

